# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Pariwisata

### 2.1.1 Definisi Pariwisata

Menurut UU Nomor 10 Tahun 2009, pariwisata (*tourist*) merupakan suatu kegiatan yang terkait dengan pariwisata dengan sifat yang multidimensi bahkan multidisiplin yang merupakan suatu wujud kebutuhan untuk setiap orang dan sebagai interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesam wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Menurut Nugroho (2012), definisi pariwisata atau *tourism* memiliki ruang lingkup dan kegiatan yang luas yang terdiri dari beberapa jenis kegiatan meliputi, wisata bahari, wisata pedesaan, wisata alam, wisata budaya, dan perjalanan bisnis. Pariwisata merupakan suatu hal yang multidimensi, ada yang melihat pariwisata dari sisi *demand* (permintaan saja), sisi *supply* (penawaran saja), dan ada yang menggabungkan antara *supply* dan *demand* (Utama, 2014).

Dalam hal permintaan pariwisata unsur yang penting adalah wisatawan dan penduduk lokal sebagai pengguna sumberdaya wisata yang berupa produk dan jasa. Bisa juga terjadi di masyarakat setempat sebagai penghasil produk wisata, misalnya dalam kasus kegiatan dan perilaku keseharian dari masyarakat setempat yang ditawarkan sebagai daya tarik wisata dan wisatawan. Penawaran pariwisata/supply adalah sesuatu yang keberadaannya ditujukan untuk ditawarkan pada wisatawan supaya dikonsumsi selama pelaksanaan kegiatan pariwisata (Wardiyanto, 2011).

### 2.1.2 Atraksi Wisata

Menurut Wardiyanto (2011), atraksi wisata merupakan daya tarik utama wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah tujuan wisata.Pengembang perlu memperhatikan masalah keberadaan atraksi ini supaya wisatawan yang berkunjung dapat memperoleh kepuasan sebagaimana yang diharapkan pada saat berwisata di daerah itu. Ketertarikan wisatawan pada atraksi yang ada di daerah tujuan wisata itu akan dipengaruhi oleh keragaman maupun kualitas atraksi yang menjadi produk wisata.

### 2.1.3 Pelayanan

Menurut Gunn (1988), fasilitas pelayanan dalam pariwisata merupakan fasilitas pendukung yang menyediakan pelayanan penting seperti, hotel, vila, restoran,dan pelayanan-pelayanan lainnya. Menurut Yoeti (1996), fasilitas wisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyediaan pelayanan kebutuhan wisatawan.

### 2.1.4 Promosi

Menurut Wijaya (2013), kegiatan promosi merupakan kegiatan yang intensif dalam waktu yang relatif singkat. Dalam kegiatan promosi itu diadakan usha untuk memperbesar daya tarik produk wisata terhadap calon konsumen. Konsumen dan permintaannya tidak digarap, akan tetapi produknya yang lebih disesuaikan dengan permintaan konsumen.

### 2.1.5 Transportasi

Menurut Yoeti (1996), berbicara mengenai pariwisata perlu untuk melakukan pengadaan dalam hal transportasi. Hal ini merupakan suatu yang tidak mungkin apabila di jaman yang ultra modern ini, ada oran yang melakukan perjalanan wisata tidak mendapat fasilitas pengangkutan yang memadai.

Tidak dapat dipungkiri bahwa fungsi utama dari transportasi sangat erat dalam mendukung aksesibilitas sehingga dapat memberikan keefisienan waktu maupun keefektifan untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, dengan adanya transportasi akan memudahkan orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu.

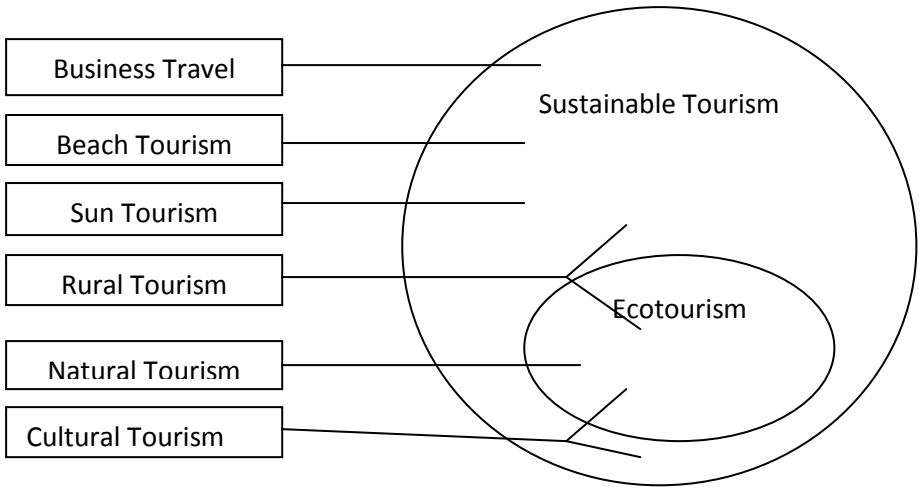
## 2.2 Ekowisata dalam Pengembangan Pariwisata

### 2.2.1 Definisi Ekowisata

Ekowisata adalah kegiatan perjalanan wisata yang dikemas secara profesional, terlatih, dan memuat unsur pendidikan, sebagai suatu sektor usaha ekonomi, yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal serta upaya-upaya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan (TIES, 2006). Dari definisi ini ekowisata dapat dilihat dari tiga perspektif, yakni; 1)Ekowisata sebagai produk; 2) Ekowisata sebagai pasar; dan 3) Ekowisata sebagai pendekatan pengembangan. Sebagai produk ekowisata merupakan semua atrksi yang berbasis pada sumberdaya alam dan budaya. Sebagai pasar, ekowisata

merupakan perjalanan yang diarahkan pada upaya-upaya pelestarian lingkungan maupun budaya yang ada. Akhirnya, sebagai pendekatan pengembangan, ekowisata merupakan metode pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pariwisata yang secara ramah lingkungan (Damanik dan Weber, 2006).

Menurut *World Conservation Union* dalam Nugroho (2015), ekowisata adalah perjalanan wisata ke wilayah-wilayah yang lingkungan alamnya masih asli, dengan menghargai warisan budaya dan alamnya, mendukung upaya-upaya konservasi, tidak menghasilkan dampak negatif, dan memberikan keuntungan sosial ekonomi serta menghargai partisipasi penduduk lokal. Pada dasarnya ekowisata adalah sebagian dari sustainable tourism. Sustainable tourism adalah sektor ekonomi yang lebih luas dari ekowisata yang mencakup sektor-sektor pendukung kegiatan wisata secara umum, meliputi wisata bahari, wisata pedesaan, wisata alam, wisata budaya, maupun perjalanan bisnis.




*Sumber : Nugroho, 2006*

**Gambar 2.1**

**Sustainable Tourism dan Ekowisata**

Sementara itu, Wood (2002) mendefinisikan ekowisata sebagai bentuk usaha atau sektor ekonomi wisata alam yang dirumuskan sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil survey terhadap kalangan wisatan yang dilakukan oleh Western Australian Tour Operator (Finucane dalam Nugroho, 2006), didapatkan hasil sebagai berikut; ekowisata adalah aktivitas wisata yang peduli dan menghargai lingkungan (dipilih 63% responden); wisatawan yang memberi dampak minimal (53 persen); wisata yang memuat

tujuan pendidikan lingkungan (32 persen); wisata dengan aktivitas memelihara sistem lingkungan (21 persen); wisata dengan jumlah wisatawan kecil (16 persen); wisata yang berdampak pada penduduk lokal; wisata yang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa wisatawan khususnya di Australian memiliki dan mengakses informasi yang baik tentang ekowisata dalam cara berpikir masing-masing. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang berpendidikan dengan akses informasi yang cukup baik.

Dalam penelitian Friedman (2009), yang membahas mengenai ekowisata di Dominica, dijelaskan bahwa ekowisata merupakan salah satu konsep pengembangan yang tepat untuk mempromosikan pembangunan daerah yang beragam, selain itu dapat meningkatkan hubungan dengan sektor ekonomi lainnya dan mendorong praktek yang lebih berkelanjutan mengenai lingkungan serta memberikan dampak positif bagi budaya setempat.

Konsep pengembangan berbasis ekowisata menjadi salah satu model pengembangan yang membawa pengaruh positif dalam peningkatan kesejahteraan di lingkungan desa. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nugrahanti dan Navastara (2012), di permukiman nelayan Pantai Timur Surabaya bahwa dalam pengembangan konsep ekowisata ini dilakukan dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui potensi kelautan dan melibatkan masyarakat dalam ekowisata.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa ekowisata dalam pengembangan pariwisata merupakan salah satu konsep pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan maupun warisan budaya yang ada.

### 2.2.2 Prinsip dan Konsep Pengembangan Ekowisata

Menurut deklrasi Quebec (hasil pertemuan dari anggota TIES di Quebec, Canada tahun 2002), secara spesifik menyebut bahwa ekowisata merupakan suatu bentuk wisata yang mengadopsi prinsip-prinsip pariwisata yang berkelanjutan yang membedakannya dengan bentuk wisata yang lain. Di dalam praktik hal itu terlihat dalam bentuk kegiatan wisata yang;

a. Berkonstribusi aktif dalam konservasi alam dan budaya.

b. Partisipasi penduduk lokal dalam perencanaan, pembangunan dan operasional kegiatan wisata serta menikmati kesejahteraan.

c. Transfer pengetahuan tentang warisan budaya dan alam kepada pengunjung.

d. Bentuk wisata independen atau kelompok wisata berukuran kecil.

Berkaitan dengan hal ini menurut From dalam Damanik dan Weber (2006), menyusun tiga konsep dasar yang lebih operasional tentang ekowisata, yaitu sebagai berikut;

1. Perjalanan outdoor dan di kawasan alam yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Dalam wisata ini orang menggunakan sumberdaya hemat energi, seperti tenaga surya, bangunan kayu, bahan daur ulang dan mata air.

2 Wisata ini mengutamakan penggunaan fasilitas transportasi yang diciptakan dan dikelola masyarakat wisata itu. Prinsipnya, akomodasi yang tersedia bukanlah perpanjangan tangan hotel internasional dan makanan yang ditawarkan juga bukan makanan berbahan baku impor melainkan semuanya berbasis produk lokal. Termasuk dalam hal ini adalah penggunaan jasa pemandu wisata lokal. Oleh sebab itu, wisata ini memberikan keuntungan langsung bagi masyarakat lokal.

3. Perjalanan wisata ini menaruh perhatian besar kepada lingkungan alam dan budaya lokal. Para wisatawan biasanya banyak belajar dari masyarakat lokal, bukan sebaliknya menggurui mereka. Wisatawan tidak menuntut masyarakat lokal agar menciptakan pertunjukan dan hiburan ekstra tetapi mendorong mereka agar diberi peluang untuk menyaksikan upacara dan pertunjukan yang sudah dimiliki oleh masyarakat setempat. Daripada menimbulkan kesan pamer kekayaan di depan masyarakat setempat, wisatawan cenderung mengurangi visual ketimpangan ekonomi itu, misalnya dengan berpakaian dan makan-minum sewajarnya sehingga tidak memberikan pendidikan yang buruk kepada anak-anak setempat.

Terhadap definisi tersebut, dapat diidentifikasi beberapa prinsip ekowisata menurut TIES 2000, yakni;

a. Mengurangi dampak negatif berupa kerusakan atau pencemaran lingkungan dan budaya lokal akibat kegiatan wisata.
b. Membangun kesadaran dan penghargaan atas lingkungan dan budaya di destinasi wisata, baik pada diri wisatawan, masyarakat lokal maupun pelaku wisata lainnya.
c. Menawarkan pengalaman-pengalalaman positif bagi wisatawan maupun masyarakat lokal melalui kontak budaya yang lebih intensif dan kerjasama dalam pemeliharaan ODTW.
d. Memberikan keuntungan finansial secara langsung bagi keperluan konservasi melalui konstribusi atau pengeluaran ekstra wisatawan.
e. Memberikan keuntungan finansial dan pemberdayaan bagi masyarakat lokal dengan menciptkan produk wisata yang mengedepankan nilai lokal.
f. Meningkatkan kepekaan terhadap situasi sosial, lingkungan, dan politik di daerah tujuan wisata.
g. Menghormati hak asasi manusia dan perjanjian kerja, dalam arti memberikan kebebasan kepada wisatawan dan masyarakat lokal untuk menikmati atraksi wisata sebagai wujud hak asasi serta tunduk pada aturan main yang adil dan disepakati bersama dalam pelaksanaan transaksi-transaksi wisata.

Sebagai suatu sektor usaha, efektifitas operasional jasa ekowisata biasanya sangat efisien dan ramping. Perjalanan wisata terdiri dari kelompok-kelompok kecil berukuran kurang dari 25 orang. Hal ini akan mencegah dampak sosial dan lingkungan yang bersifat masif akibat kehadiran fisik pengunjung. Akomodasi penginapan memuat kurang dari 100 tempat tidur sehingga mencerminkan beroperasinya usaha kecil dan menengah dan partisipasi penduduk lokal. Kegiatan wisata ini memberikan unsur pendidikan yang sistematis dalam rangka pemahaman lingkungan secara komprehensif. Oleh sebab itu, sektor usaha ekowisata memerlukan pemandu lokal yang terampil, pintar dan berdedikasi.

Pengembangan jasa ekowisata diharuskan memiliki manajemen yang profesional, mencakup:

1. Pemasaran yang spesifik menuju tujuan wisata. Strategi pemasaran menempati posisi penting untuk menjangkau dan menarik pengunjung seluruh dunia.
2. Keterampilan dan layanan kepada pengunjung secara intensif. Layanan ekowisata adalah pengalaman dan pendidikan terhadap lingkungan atau wilayah yang baru. Kepuasan pengunjung akan tercapai melalui ragam layanan yang sabar dan efektif.
3. Keterlibatan penduduk lokal dalam memandu dan menerjemahkan objek wisata. Penduduk lokal akan memiliki intensif konservasi lingkungan apabila ia dilibatkan dalam jasa-jasa ekowisata, pemberi informasi, dan memperoleh manfaat yang pantas.
4. Kebijakan pemerintah dalam kerangka melindungi aset lingkungan dan budaya. Kebijakan penataan ruang, pemberdayaan kemasyarakatan atau dikombinasi dengan instrumen ekonomi, akan mencegah mekanisme pasar beroperasi di wilayah tujuan ekowisata.
5. Pengembangan kemampuan penduduk lokal. Penduduk lokal dan lingkungannya adalah kesatuan utuh wilayah ekowisata. Mereka perlu dikembangkan potensi dan partisipasinya untuk memperoleh keuntungan agar tercipat insentif dan motivasinya untuk ikut mengkonservasi lingkungannya.

Baik definisi maupun prinsip-prinsip ekowisata mempunyai implikasi langsung pada wisatawan dan penyedia jasa wisata. Wisatawan dituntut untuk tidak hanya mempunyai kesadaran lingkungan dan kepekaan sosial budaya yang tinggi, tetapi juga mampu melakukannya dalam kegiatan wisata, misalnya memberikan pengeluaran ekstra untuk pelestarian alam, pengeluaran yang lebih besar untuk produk-produk lokal, pemanfaatan jasa lokal, dan sebagainya. Sejalan dengan hal itu penyedia jasa juga dituntut untuk mampu menyediakan produk-produk yang ramah lingkungan. Dalam pengembangan atraksi wisata, misalnya, lokasinya dekat dengan alam, model pengembangannya serasi dengan lingkungan, layanannya juga ramah lingkungan, dan yang tidak kalah penting adalah harus memberdayakan masyarakat lokal secara sosial, ekonomi dan budaya (Damanik dan Weber, 2006).

Konsumen ekowisata adalah mereka yang menginginkan liburan dengan sensasi alam yang tinggi. Mereka bersedia meluangkan waktu yang relatif panjang dan cukup uang untuk memuaskan keinginannya selama liburannya. Karenanya, pengelola jasa ekowisata perlu menyediakan akomodasi dan sajian wisata dengan kemasan yang baik, aman, dan memuaskan. Terlebih beberapa pengunjung kebanyakan adalah berusia lanjut sehingga sehingga perlu diberikan kenyamanan dan kemudahan secara fisik (Nugroho, 2015).

## 2.3 Ekowisata Berbasis Masyarakat

### 2.3.1 Definisi Ekowisata Berbasis Masyarakat

Menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF Indonesia (2009), ekowisata berbasis masyarakat merupakan usaha ekowisata yang menitikberatkan peran aktif komunitas. Dalam hal ini masyarakat setempat dilibatkan secara penuh dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan usaha ekowisata dan segala keuntungan yang diperoleh. Hal tersebut didasarkan kepada kenyataan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan tentang alam serta budaya yang menjadi potensi dan nilai jual sebagai daya tarik wisata, sehingga perlibatan masyarakat menjadi suatu hal yang mutlak. Pola ekowisata berbasis masyarakat mengakui hak masyarakat lokal dalam mengelola kegiatan wisata di kawasan yang mereka miliki secara adat ataupun sebagai pengelola.

Menurut Asian Pacific Economic (2009), sistem pariwisata atau ekowisata berbasis masyarakat merupakan suatu alat pengembangan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan masyarakat pedesaan untuk mengelola sumber daya pariwisata yang ada sambil memastikan partisipasi masyarakat. Melalui program ekowisata berbasis masyarakat ini dapat membantu masyarakat setempat dalam menghasilkan pendapatan, melestarikan budaya, lingkungan dan memberikan edukasi. Pada dasarnya ekowisata berbasis masyarakat ini juga berfungsi dalam mereduksi tingkat kemiskinan masyarakat pedesaan.

Ekowisata berbasis masyarakat dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat, dan mengurangi kemiskinan, di mana penghasilan ekowisata adalah dari jasa-jasa wisata untuk turis seperti fee pemandu, ongkos transportasi, homestay, menjual kerajinan, dan lain-lain. Ekowisata membawa dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat yang

pada akhirnya diharapkan akan mampu menumbuhkan jati diri dan rasa bangga antar penduduk setempat yang tumbuh akibat peningkatan kegiatan ekowisata.

Dengan adanya pola ekowisata berbasis masyarakat bukan berarti bahwa masyarakat akan menjalankan usaha ekowisata sendiri. Tataran implementasi ekowisata perlu dipandang sebagai bagian dari perencanaan pembangunan terpadu yang dilakukan pada suatu daerah. Untuk itu, perlibatan para pihak mulai dari level komunitas, masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan organisasi non pemerintah diharapkan membangun suatu jaringan dan menjalankan suatu kemitraan yang baik sesuai dengan peran dan keahlian masing-masing.

Beberapa aspek kunci dalam ekowisata berbasis masyarakat (Departemen Pariwisata dan Kebudayaan dan WWF,2009) adalah sebagai berikut;

a. Masyarakat membentuk panitia atau lembaga untuk pengelolaan kegiatan ekowisata di daerahnya, dengan dukungan dari pemerintah dan organisasi masyarakat (nilai partisipasi masyarakat dan edukasi)
b. Prinsip *local ownership* (pengelolaan dan kepemilikan oleh masyarakat setempat) diterapkan sedapat mungkin terhadap sarana dan prasarana ekowisata, kawasan ekowisata, dan lain-lain (nilai partisipasi masyarakat)
c. Homestay menjadi pilihan utama untuk sarana akomodasi di lokasi wisata (nilai ekonomi dan edukasi)
d. Pemandu adalah orang setempat (nilai partisipasi masyarakat)
e. Perintisan, pengelolaan, dan pemeliharaan objek wisata menjadi tanggungjawab masyarakat setempat, termasuk penentuan biaya untuk wisatawan (nilai ekonomi dan wisata).

Menurut Widjanarko dan Wismar'ein (2011), dalam penelitian yang membahas mengenai identifikasi sosial potensi ekowisata berbasis peran masyarakat lokal, ekowisata berbasis masyarakat merupakan salah satu konsep yang perlu diberdayakan kepada masyarakat yang mana masyarakat harus berperan aktif dalam kegiatan pengembangan ekowisata dari mulai perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Hasil ekowisata pun sebanyak mungkin harus dinikmati oleh masyarakat setempat.

Ekowisata memiliki dampak pro-masyarakat miskin terbesar kepada masyarakat pedesaan karena pelanggan datang ke kawasan ekowisata menciptakan ruang fasilitas/produk untuk dijual langsung sehingga mendorong *multiplier effect*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Sirugu, Ghana yang membahas mengenai ekowisata berbasis masyarakat disimpulkan bahwa ekowisata berbasis masyarakat dapat digunakan sebagai alat strategi untuk pengentasan kemiskinan (Wuleka, dkk, 2012).

Dalam penelitian Kontogeorgopoulos (2015), yang membahas mengenai ekowisata berbasis masyarakat di Phuket dan Ao Phangnga, Thailand, penawaran ekowisata berbasis masyarakat menjadi suatu harapan bahwa sensitivitas lingkungan dan tanggung jawab dipromosikan oleh ekowisata juga dapat melayani kepentingan politik, ekonomi, dan sosial ekowisata berbasis masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ekowisata berbasis masyarakat sangat menguntungkan wilayah karena dalam konsep ini masyarakat lokal yang langsung terlibat aktif dalam mengelola sumber daya yang ada dalam suatu wilayah. Dalam keterlibatan masyarakat lokal ini bisa memberikan konstribusi dalam hal peningkatan ekonomi suatu wilayah.

### 2.3.2 Prinsip Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat

Dalam pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, perlu untuk mengacu pada prinsip-prinsip pengembangan ekowisata berbasis masyarakat yang disesuaikan dengan kriteria.

1. Keberlanjutan Ekowisata dari Aspek Ekonomi, Sosial dan Lingkungan (Prinsip Konservasi dan Partisipasi Masyarakat)

   Ekowisata yang dikembangkan di kawasan konservasi adalah ekowisata yang “Hijau dan Adil” untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan dan konservasi, yaitu sebuah kegiatan usaha yang bertujuan untuk menyediakan alternatif ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat di kawasan yang dilindungi, berbagi manfaat dari upaya konservasi secara layak (terutama bagi masyarakat yang lahan dan sumberdaya alamnya berada di kawasan yang dilindungi), dan berkonstribusi pada konservasi dengan meningkatkan kepedulian dan dukungan terhadap perlindungan

bentang alam yang memiliki nilai biologis, ekologis, dan nilai sejarah yang tinggi.

2. Pengembangan Institusi Masyarakat Lokal dan Kemitraan (Prinsip Partisipasi Masyarakat)

   Aspek organisasi dan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata juga menjadi isu kunci: pentingnya dukungan yang profesional dalam menguatkan organisasi lokal secara kontinyu, mendorong usaha yang mandiri dan menciptakan kemitraan yang adil dalam pengembangan ekowisata. Beberapa contoh dilapangan menunjukkan bahwa ekowisata di tingkat lokal dapat dikembangkan melalui kesepakatan dan kerjasama yang baik antara Tour Operator dan organisasi masyarakat. Peran organisasi masyarakat sangat penting oleh karena masyarakat adalah stakeholder utama dan akan mendapatkan manfaat secara langsung dari pengembangan dan pengelolaan ekowisata. Koordinasi antar stakeholders juga perlu mendapatkan perhatian. Salah satu model percontohan organisasi pengelolaan ekowisata yang melibatkan semua stakeholders termasuk, masyarakat, pemerintah daerah, UPT, dan sektor swasta. Terbentuknya forum atau dewan pembina akan banyak membantu pola pengelolaan yang adil dan efektif terutama di daerah di mana ekowisata merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat setempat.

3. Ekonomi Berbasis Masyarakat (Prinsip Partisipasi Masyarakat)

   Homestay adalah sistem akomodasi yang sering dipakai dalam ekowisata. Homestay bisa mencakup berbagai jenis akomodasi dari penginapan sederhana yang dikelola secara langsung oleh keluarga sampai dengan menginap di rumah keluarga setempat. Homestay bukan hanya sebuah pilihan akomodasi yang tidak memerlukan modal yang tinggi, dengan sistem homestay pemilik rumah dapat merasakan secara langsung manfaat ekonomi dari kunjungan turis, dan distribusi manfaat di masyarakat lebih terjamin. Sistem homestay mempunyai nilai tinggi sebagai produk wisata dimana seorang turis mendapatkan kesempatan untuk belajar mengenai alam, budaya, masyarakat dan kehidupan sehari-hari di lokasi tersebut. Pihak turis dan pihak tuan rumah bisa saling mengenal dan belajar satu

sama lain, dan dengan itu dapat menumbuhkan toleransi dan pemahaman yang lebih baik. Dalam ekowisata, pemandu adalah orang lokal yang pengetahuan dan pengalamannya tentang lingkungan dan alam setempat merupakan aset terpenting dalam jasa yang diberikan kepada turis. Demikian juga seorang pemandu lokal akan merasakan langsung manfaat ekonomi dari ekowisata, dan sebagai pengelola juga akan menjaga kelestarian alam dan objek wisata.

4. Prinsip Edukasi

   Ekowisata memberikan banyak peluang untuk memperkenalkan kepada wisatawan tentang pentingnya perlindungan alam dan penghargaan terhadap kebudayaan lokal. Dalam pendekatan ekowisata, pusat informasi menjadi hal yang penting dan dapat juga dijadikan pusat kegiatan dengan tujuan meningkatkan nilai dari pengalaman seorang turis yang bisa memperoleh informasi yang lengkap tentang lokasi atau kawasan dari segi budaya, sejarah, alam, dan menyaksikan acara seni, kerajinan, dan produk budaya lainnya.

5. Pengembangan dan Penerapan Serta Kerangka Kerja Pengelolaan Ekowisata (Prinsip Konservasi dan Wisata)

   Dalam perencanaan kawasan ekowisata, soal daya dukung perlu diperhatikan sebelum perkembangannya ekowisata berdampak negatif terhadap alam (dan budaya) setempat. Aspek dari daya dukung yang perlu dipertimbangkan adalah: jumlah turis/tahun; lamanya kunjungan turis; berapa sering lokasi yang rentang secara ekologis dapat dikunjungi. Zonasi dan pengaturannya adalah salah satu pendekatan yang akan membantu menjaga nilai konservasi dan keberlanjutan kawasan ekowisata.

Berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan tersebut maka dapat dijabarkan kriteria penerapan ekowisata berbasis masyarakat yang sesuai dengan prinsip tersebut.

**Tabel 2.1**

**Prinsip dan Kriteria Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat**

| No. | Prinsip Pengembangan | Kriteria |
|---|---|---|
| 1. | Keberlanjutan Ekowisata | • Mengelola tingkat kunjungan dan kegiatan |

| No. | Prinsip Pengembangan | Kriteria |
|---|---|---|
| | dari Aspek Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan (Prinsip Konservasi dan Partisipasi Masyarakat) | wisata sesuai dengan batas-batas yang dapat diterima baik dari segi alam maupun sosial-budaya.<br>• Menggunakan teknologi ramah lingkungan<br>• Mendorong terbentuknya "*ecotourism conservancies*" |
| 2. | Pengembangan Institusi Masyarakat Lokal dan Kemitraan (Prinsip Partisipasi Masyarakat) | • Membangun kemitraan antara masyarakat dengan Tour Operator serta lembaga masyarakat dan dinas pariwisata untuk memasarkan dan mempromosikan produk ekowisata<br>• Adanya pembagian adil dalam pendapatan dari jasa ekowisata di masyarakat<br>• Organisasi masyarakat membuat panduan untuk turis<br>• Ekowisata memperjuangkan prinsip perlunya usaha melindungi pengetahuan serta hak atas karya intelktual masyarakat lokal, termasuk: foto, kesenian, pengetahuan tradisional, musik, dan lain-lain |
| 3. | Ekonomi Berbasis Masyarakat (Prinsip Partisipasi Masyarakat) | • Mendorong adanya regulasi yang mengatur standar kelayakan homestay sesuai dengan kondisi lokasi wisata<br>• Mendorong adanya prosedur sertifikasi pemandu sesuai dengan kondisi lokasi wisata<br>• Mendorong ketersediaan homestay<br>• Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta perilaku bagi para pelaku ekowisata terutama masyarakat |
| 4. | Prinsip Edukasi | • Mendorong masyarakat mendukung dan mengembangkan upaya konservasi |

| No. | Prinsip Pengembangan | Kriteria |
|---|---|---|
| | | • Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengubah perilaku masyarakat tentang perlunya upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya<br>• Edukasi tentang budaya setempat dan konservasi untuk para turis menjadi bagian dari paket ekowisata<br>• Mengembangkan skema di mana tamu secara sukarela terlibat dalam kegiatan konservasi dan pengelolaan kawasan ekowisata selama kunjungannya (stay & volunteer). |
| 5. | Pengembangan dan Penerapan serta Kerangka Kerja Pengelolaan Lokasi Ekowisata (Prinsip Konservasi dan Wisata) | • Memperhitungkan tingkat pemanfaatan ruang dan kualitas daya dukung lingkungan kawasan tujuan melalui pelaksanaan sistem zonasi dan pengaturan waktu kunjungan<br>• Fasilitas pendukung yang dibangun tidak merusak atau didirikan pada ekosistem yang sangat unik dan rentan.<br>• Rancangan fasilitas umum sedapat mungkin sesuai tradisi lokal, dan masyarakat lokal terlibat dalam proses perencanaan dan pembangunan<br>• Ada sistem pengolahan sampah di sekitar fasilitas umum<br>• Kegiatan ekowisata mendukung program reboisasi untuk menyeimbangi penggunaan kayu bakar untuk dapur dan rumah<br>• Mengembangkan paket-paket wisata yang mengedepankan budaya, seni, dan tradisi lokal.<br>• Kegiatan sehari-hari termasuk panen, menanam, mencari ikan, berburu dapat |

| No. | Prinsip Pengembangan | Kriteria |
|---|---|---|
| | | dimasukkan ke dalam atraksi lokal untuk memperkenalkan wisatawan pada cara hidup masyarakat dan mengajak mereka menghargai pengetahuan dan kearifan lokal. |

*Sumber : Departemen Pariwisata dan Kebudayaan dan WWF, 2009*

Berkaitan dengan tujuan dari penelitian ini mengenai penerapan ekowisata berbasis masyarakat, maka beberapa prinsip dan kriteria di atas yang menjadi dasar dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut;

**Tabel 2.2**

**Prinsip dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat dengan Mempromosikan Kearifan Lokal**

| No | Prinsip | Kriteria |
|---|---|---|
| 1. | Pengembangan Institusi Masyarakat Lokal dan Kemitraan (Prinsip Partisipasi Masyarakat) | • Membangun kemitraan antara masyarakat dengan tour operator serta lembaga masyarakat dan dinas pariwisata untuk memasarkan dan mempromosikan produk ekowisata<br>• Adanya pembagian adil dalam pendapatan dari jasa ekowisata di masyarakat<br>• Organisasi masyarakat membuat panduan untuk turis<br>• Mendorong adanya prosedur sertifikasi pemandu sesuai dengan kondisi lokasi wisata<br>• Mendorong ketersediaan homestay<br>• Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta perilaku bagi para pelaku ekowisata terutama masyarakat |
| 2. | Prinsip Partisipasi Masyarakat dan Kearifan | • Ekowisata memperjuangkan prinsip perlunya usaha melindungi pengetahuan serta hak atas karya |

| No | Prinsip | Kriteria |
|---|---|---|
| | Lokal | intelektual masyarakat lokal, termasuk: foto, kesenian, pengetahuan tradisional, musik, dan lain-lain<br>• Edukasi tentang budaya setempat dan konservasi untuk para turis menjadi bagian dari paket ekowisata<br>• Kegiatan sehari-hari termasuk panen, menanam, mencari ikan, berburu, untuk memperkenalkan kepada wisatawan pada cara hidup masyarakat dan mengajak mereka menghrgai pengetahuan dan kearifan lokal. |
| 2. | Pengembangan dan Penerapan serta Kerangka Kerja Pengelolaan Lokasi Ekowisata | • Fasilitas pendukung yang dibangun tidak merusak atau didirikan pada ekosistem yang sangat unik dan rentan<br>• Rancangan fasilitas umum sedapat mungkin sesuai tradisi lokal, dan masyarakat lokal terlibat dalam proses perencanaan dan pembangunan<br>• Ada sistem pengolahan sampah disekitar fasilitas umum<br>• Mengembangkan paket-paket wisata yang mengedepankan budaya, seni, dan tradisi lokal |

*Sumber : Departemen Pariwisata dan Kebudayaan dan WWF, 2009*

### 2.3.3 Konsep Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat

Pada dasarnya, ekowisata berbasis masyarakat perlu dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, mulai dengan mempelajari kesesuaian masyarakat untuk terlibat dalam proyek-proyek pariwisata yang ada maupun terlibat dalam memantau dan mengendalikan dampak negatif yang ditimbulkan dari pariwisata. Beberapa karakteristik yang secara umum telah dirumuskan oleh UNEP dan UNWTO sebagai ciri-ciri dari wisata yang berbasis masyarakat sebagai berikut;

- Melibatkan apresiasi tidak hanya terhadap alam tetapi juga budaya asli yang berlaku di daerah wisata sebagai bagian dari pengalaman pengunjung.
- Mengandung pendidikan dan interpretasi sebagai bagian dari tawaran wisata.
- Bersifat umum tetapi tidak ekslusif, diselenggarakan untuk kelompok-kelompok kecil dengan usaha kecil, khusus, dan milik lokal.
- Meminimalkan dampak negatif pada lingkungan alam dan sosial budaya.
- Mendukung perlindungan daerah alam dan budaya dengan menghasilkan manfaat ekonomi dari sumber daya tersebut.
- Memberikan alternatif pendapatan dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
- Meningkatkan kesadaran lokal dan pengunjung terhadap konservasi.

Berdasarkan Asian Pacific Economic Cooperation (2009), terdapat 9 langkah yang menjadi acuan dari pengembangan dan keberlanjutan pariwisata atau ekowisata berbasis masyarakat. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut;

**1. Menilai Kebutuhan Masyarakat dan Kesiapan untuk Pariwisata.**

Berkaitan dengan penilaian kebutuhan masyarakat dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi pariwisata, akan ditinjau berdasarkan langkah-langkah berikut;

**a. Mengajukan pertanyaan mengenai alasan masyarakat untuk terlibat dalam pariwisata.**

Pada proses ini akan diidentifikasi mengenai alasan keterlibatan masyarakat lokal untuk mau terlibat dalam kegiatan pariwisata. Latar belakang masyarakat ini yang menjadi acuan untuk tindak selanjutnya.

b. **Menentukan peran pariwisata**

Terhadap bentuk keterlibatan masyarakat dalam pariwisata, perlu untuk memberikan penjelasan bahwa sebenarnya pariwisata tidak harus dianggap sebagai obat mujarab, diperlukan perencanaan yang matang dan

pelaksanaan yang sistematis untuk memberikan dampat yang positif. Oleh karena itu sangat penting bahwa peran pariwisata harus dikomunikasikan kepada masyarakat setempat terutama dengan cara yang berbeda, bahwa pariwisata dapat berfungsi sebagai berikut;

- Pariwisata sebagai sumber alternatif dan menguntungkan bagi mata pencaharian dan pendapatan

  Peran khusus ini sangat tepat untuk masyarakat yang sumber mata pencaharian saat ini berada di bawah rata-rata yang dapat menyebabkan pengangguran yang tinggi, insiden kemiskinan yang tinggi, yang bahkan dapat menyebabkan masalah sosial terutama pada kalangan pemuda.
- Pariwisata sebagai alat untuk membenarkan upaya konservasi

  Pada banya masyarakat pedesaan dan miskin, pariwisata sering digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, pariwisata telah berhasil digunakan sebagai alat untuk membenarkan upaya konservasi. Namun, peran ini jarang didokumentasikan mengingat bahwa komentar-komentar pada proyek-proyek tersebut lebih memilih untuk hanya fokus pada manfaat ekonomi langsung dari proyek ekowisata berbasis masyarakat.
- Pariwisata sebagai “tempat latihan” untuk partisipasi yang akan datang di sektor ekonomi lainnya.

  Pada negara berkembang, instansi pemerintah telah diamati untuk mendukung penyaluran bantuan keuangan kepada masyarakat yang memiliki keberhasilan yang baik. Dengan demikian, masyarakat yang beroperasi pada proyek pariwisata yang sukses dan program yang sering dipamerkan sebagai model desa wisata yang sukses khususnya yang sering mendapatkan kunjungan dari politisi, pejabat, dan instansi pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri.

c. Melakukan Analisis Situasi

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui perilaku, fokus, dan aspirasi dari masyarakat. Beberapa hal yang dapat diasumsikan mengenai analisis situasi adalah sebagai berikut;

- Harapan yang akan didapatkan masyarakat

  Melalui proses ini perlu untuk mengetahui apa yang menjadi harapan masyarakat apabila kegiatan pariwisata ini terselenggara di lingkup wilayahnya.
- Nilai-nilai masyarakat, sikap dan kekhawatiran.

  Dalam penerapan suatu konsep pariwisata perlu untuk mengetahui nilai-nilai yang menjadi tradisi masyarakat dalam suatu wilayah serta memprediksikan akan kekhawatiran yang sekiranya bisa membawa dampak dalam penerapan konsep ini.
- Kebutuhan tenaga kerja untuk pariwisata

  Perlu untuk melakukan identifikasi mengenai permintaan tenaga kerja dalam suatu wilayah terhadap bidang pariwisata. Tenaga kerja ini dapat berupa pelaku usaha sebagai pemandu, pengelola kerajinan lokal, maupun homestay serta usaha-usaha lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan pariwisata.

**2. Mendidik dan Mempersiapkan Masyarakat untuk Pariwisata**

Upaya dalam memberikan pendidikan dan mempersiapkan masyarakat dalam pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, dapat dilakukan berdasarkan tahapan berikut ini;

a. Melakukan Lokakarya Awal

Pada dasarnya perlu untuk mengadakan serangkaian lokakarya awal yang harus dilakukan dalam tahap awal untuk mencapai tujuan sebagai berikut;

- Mengidentifikasi kegiatan pariwisata yang potensial untuk dikembangkan dan dipromosikan.

  Lokakarya awal harus mengajak seluruh lapisan masyarakat lokal untuk mendiskusikan dan mengidentifikasi sumber daya dan kegiatan dalam suatu wilayah yang akan menarik bagi wisatawan. Lokakarya ini harus mengambil bentuk latihan brainstorming, untuk yang pertama memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk

membuat saran dan yang kedua evaluasi dan memberikan prioritas kegiatan yang diusulkan. Membangun hubungan dengan atraksi pariwisata di sekitar. Dalam kebanyakan kasus, suatu wilayah tertentu tidak akan memiliki kekuatan untuk berdiri sendiri sebagai tujuan wisata. Dengan demikian, tindak lanjut lokakarya harus diadakan untuk menentukan bagaimana suatu wilayah dapat diposisikan dan dikemas sebagai bagian dari koridor tujuan wisata yang menarik.

- Mengorganisir lokakarya tentang keterlibatan masyarakat pada bagian yang lain.

  Setelah mengidentifikasi potensi wisata maupun kegiatan di suatu wilayah dan sekitarnya, hal lain yang harus dilakukan untuk menentukan bagian peran yang berbeda dari masyarakat. Misalnya, pemuda setempat dapat dilatih untuk menjadi pemandu dan pemain atraksi budaya, sementara wanita bisa dipekerjakan sebagai penyedia makanan dan rumah tangga serta memproduksi kerajinan. Hal ini juga penting bahwa lokakarya mengidentifikasi tidak hanya mereka yang dapat terlibat dalam produksi kerajinan tetapi juga individu-individu yang memiliki pemasaran dan keterampilan manajemen untuk menjalankan pusat kerajinan.

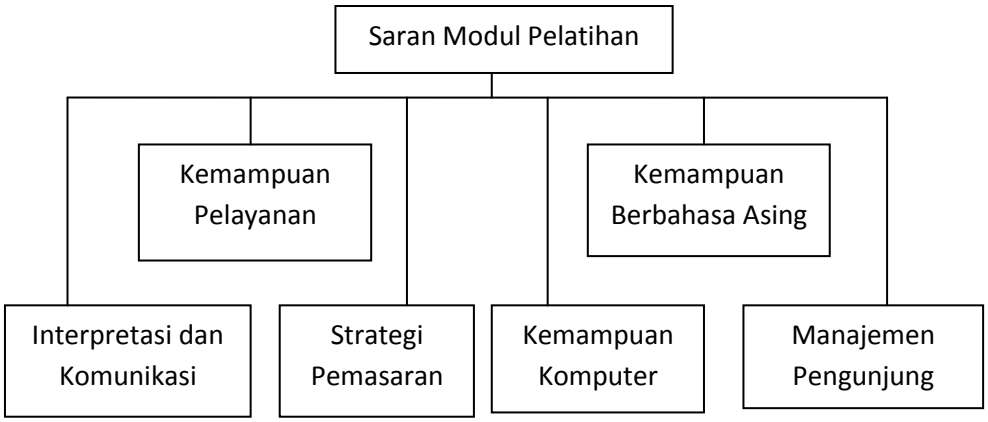
- Mengidentifikasi Kebutuhan Pelatihan

  Dalam sesi terakhir lokakarya masyarakat harus mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan dan keterampilkan mereka. Selanjutnya, akan memberikan dasar bagi mereka untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang harus dipenuhi dalam lokakarya lanjutan.

- Mengembangkan dan Melaksanakan Modul Pelatihan Lanjutan

  Pada saat masyarakat berada pada kenyamanan dengan konsep permintaan dan penawaran dalam bidang pariwisata ( dikomunikasikan melalui lokakarya awal), mereka kemudian siap diberikan paparan yang lebih terstruktur dan pelatihan. Pada intinya

pelatihan lanjutan harus dilakukan dalam bentuk modul, meliputi aspek seperti;




Sumber : *Asian Pacific Economic Asean, 2009*

**Gambar 2.2**

**Struktur Modul Pelatihan**

b. Study trip dan Pelatihan "Masyarakat untuk Masyarakat

Sebuah perjalanan studi sangat efektif dalam membantu menunjukkan masyarakat secara langsung mengenai proyek ekowisata berbasis masyarakat. Selain itu, akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengalami terhadap hal yang disajikan dan memberikan evaluasi tentang tingkat pelayanan dan keramahtamahan serta kualitas pengalaman wisata yang ditawarkan kepada mereka. Ini akan membantu mereka memahami tamu yang dapat menuntut, rewel, dan ahli yang terbaik selama mereka tinggal. Pelajaran berharga seperti perjalanan studi ini akan membantu masyarakat dalam mengeluarkan ide-ide baru untuk meningkatkan produk, pengalaman wisata mereka dan kualitas layanan. Sementara pelatihan masyarakat untuk masyarakat hanya berlaku untuk perjalanan studi oleh minoritas etnis tertentu kepada masyarakat lain dengan memiliki karakteristik etnis yang hampir sama tetapi dengan pengalaman yang sudah banyak dalam konsep ekowisata berbasis masyarakat. Seperti yang diamati bahwa semangat persahabatan lebih kuat dalam program pelatihan tersebut dan hambatan terhadap bahasa dan budaya juga berkurang secara signifikan.

c. Perumusan Pelatihan Secara Manual.

Untuk memastikan bahwa pelatihan dilakukan secara sistematis dan konsisten, pelatihan secara manual harus dirumuskan. Hal ini penting untuk menjamin keberlanjutan proyek dari ekowisata berbasis masyarakat dari perspektif pengembangan sumber daya manusia. Dengan dokumentasi modul pelatihan dan instruksi serta hal lainnya yang dilakukan secara manual. Meskipun panitia manajemen dan pelatihan dapat berubah di masa depan tetapi struktur pelatihan dan sistem tetap akan utuh.

**3. Mengidentifikasi dan Menetapkan Kepemimpinan**

Pada dasarnya keberhasilan proyek ekowisata berbasis masyarakat tergantung pada kepemimpinan dan organisasi. Instansi pemerintah atau LSM seharusnya bertindak sebagai inisiator dari proyek ini, tetapi keberlanjutannya tergantung dari rasa kepemilikan dan membeli dari masyarakat setempat. Pusat dari keberlanjutan dukungan dari masyarakat adalah adanya pemimpin yang kuat yang menghormati perintah. Pemimpin terhadap pelaksanaan ekowisata berbasis masyarakat ini bisa berasal dari pihak pemerintah yang ditunjuk sebagai manajer proyek, ataupun volunter dari LSM serta seorang juru bicara yang di pilih dari kalangan masyarakat.

**4. Mempersiapkan dan Mengembangkan Organisasi Masyarakat**

Pada saat ini, pemimpin harus berusaha untuk mendirikan sebuah organisasi masyarakat yang merencanakan, mengoperasikan, dan mempromosikan dari program-program ekowisata berbasis masyarakat. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan dikembangkan adalah sebagai berikut;

a. Siklus Produk Pariwisata

Proyek ekowisata berbasis masyarakat akan melalui siklus kehidupan yang mungkin akan mengalami fase kegagalan dalam kepemimpinan dan organisasi untuk kembali menemukan produk yang sudah ada setelah itu mengalami perkembangan. Tahap perkembangan dalam siklus ini memerlukan struktur organisasi yang berbeda.

- Organisasi Masyarakat Dalam Tahap Awal Pengembangan

  Berdasarkan studi kasus yang ada, suatu organisasi masyarakat awalnya terdiri dari individu yang berbakat serta memiliki komitmen

dari sebagian kecil masyarakat. Mengingat sifat sukarela dari keterlibatan mereka, yang memiliki semangat dalam pekerjaan dan keinginan untuk melayani adalah dua kualitas penting yang harus dimiliki.

- Organisasi Masyarakat Dalam Ekowisata Berbasis Masyarakat yang Sudah Berkembang

  Sebuah proyek ekowisata berbasis masyarakat yang sudah mengalami perkembangan, bahkan menjadi bagian dari pariwisata yang utama, maka dimensi bisnis dan hubungan dengan pemangku kepetingan lainnya dalam industri ini juga menjadi lebih kompleks. Selanjutnya, tujuan dari wilayah pasti akan menarik segmen pasar yang lebih beragam, masing-masing dengan kebutuhan yang berbeda.

b. Mengidentifikasi Peran Organisasi Ekowisata Berbasis Masyarakat

Beberapa peran organisasi dalam pelaksanaan ekowisata berbasis masyarakat adalah sebagai berikut;

- Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda

  Organisasi masyarakat yang mengoperasikan proyek ekowisata berbasis masyarakat harus melakukan pemberdayaan kepada perempuan dan pemuda lokal dengan membuat kantor yang spesifik untuk mereka. Penunjukan pegawai kantor dan pengangkatan jabatan dari peran tersebut harus berdasarkan talenta yang dimiliki. Pada umumnya, pemuda akan berperan sebagai pemandu dan pemain atraksi budaya. Sementara itu perempuan lokal biasanya akan dipercayakan untuk menangani acara yang diadakan masyarakat, rumah tangga, dan produksi kerajinan.

- Merumuskan Visi Umum

  Ketika sebuah organisasi telah terbentuk, maka perlu untuk menyediakan arah untuk memandu masyarakat dalam melaksanakan program ekowisata berbasis masyarakat. Masyrakat terpencil mungkin tidak siap untuk berpartisipasi dalam lokakarya masyarakat yang melibatkan penggunaan alat-alat partisipasi publik seperti visi.

Hal ini tidak mengurangi pentingnya mendapatkan konsensus dari masyarakat mengenai rencana pariwisata untuk wilayah. Penduduk setempat juga harus diberitahu tentang kemungkinan dampak dari pariwisata, bagaimana hal itu akan mengubah hidup mereka dan pengorbanan yang mereka harus buat. Setelah merumuskan visi bersama-sama, maka organisasi harus menetapkan target yang realistis dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat pendidikan masyarakat, keterampilan, dan kesenjangan pelatihan.

- Memelihara Anti Mental Bantuan

  Salah satu fitur umum di antara studi kasus adalah kemerdekaan dan kurangnya ketergantungan dari bantuan pemerintah. Meskipun benar bahwa proyek-proyek ekowisata berbasis masyarakat yang lebih baru diprakarsai oleh LSM internasional belum mencapai tingkat kemandirian yang lebih mapan.

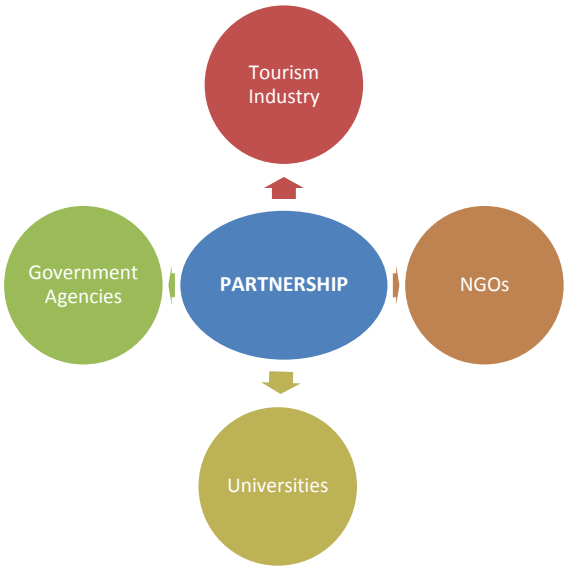
- Membangun Sebuah Dana Masyarakat

  Pada awalnya, organisasi harus menyiapkan dana masyarakat untuk mengelola pendapat dan pengeluaran yang berhubungan dengan proyek ekowisata berbasis masyarakat. Hal ini lebih disukan dalam bentuk dana bergulir di mana penduduk setempat juga bisa memperoleh kredit mikro dengan bunga rendah untuk memulai usaha kecil. Selain itu, sebagian kecil dari penghasilan yang berasal dari proye-proyek dan kegiatan pariwisata harus disalurkan untuk dana masyarakat yang akan digunakan untuk pembangunan sosial-ekonomi seperti membeli komputer untuk pemuda setempat.

**5. Membangun Kerjasama**

Sebagai proyek ekowisata berbasis masyarakat yang berkembang menjadi sebuah perusahaan bisnis yang kompleks, perlu untuk memperluas segmen target pasar. Pada saat ini, ekowisata berbasis masyarakat akan mencapai persimpangan di mana jalur berikutnya adalah membangun daya saing. Pusat untuk upaya dalam membangun daya saing adalah pembentukan kemitraan dengan pihak pengambil

keputusan.




*Sumber :Asian Pacific Economic Asean, 2009*

**Gambar 2.3**

**Bentuk Kerjasama**

a. Kerjasama dengan LSM

Kerjasama dengan pihak LSM baik luar maupun dalam negeri akan meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai penanggung jawab proyek konservasi dimana pariwisata digunakan sebagai alat.

b. Kerjasama dengan Universitas

Melakukan kerjasama dengan pihak universitas akan mendidik masyarakat setempat pada kerangka yang sesuai untuk mengembangkan proyek-proyek ekowisata berbasis masyarakat dan melengkapi organisasi dengan alat dan pendekatan untuk meningkatkan kualitas pengalaman wisata. Universitas juga akan membantu dalam hal penelitian untuk menganalisis perubahan permintaan wisatawan dan pelatih untuk melakukan program peningkatan kapasitas yang berguna bagi pengembangan pariwisata etnis di situs ekowisata berbasis masyarakat.

c. Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah

Kerjasama dengan lembaga pemerintah bisa menyebabkan organisasi masyarakat akan mengandalkan bantuan maupun subsidi jika fokus ditempatkan pada upaya memproduksi hasil dan bukan pemberdayaan. Untuk kerjasama

tersebut akan menjadi efektif apabila instansi pemerintah terkait harus mengambil langkan pendekatan dengan memiliki petugas lapangan yang di tempatkan pada lokasi objek-objek wisata untuk memberikan jasa konsultasi kepada masyarakat setempat.

d. Kerjasama dengan Industri Pariwisata

Kerjasama dengan industri pariwisata akan efektif jika hanya berfokus pada pemasaran dan promosi. Meskipun demikian, organisasi ekowisata berbasis masyarakat harus selektif dalam menempa kemitraan dengan pihak operator tour wisata karena pengalaman wisata yang ditawarkan oleh proyek tersebut menarik hanya untuk segmen pasar tertentu seperti mahasiswa. Organisasi ekowisata berbasis masyarakat harus berasal dari kemitraan dengan operator tur dan penanganan yang telah membentuk jaringan dengan spesialis operator tur di tingkat internasional. Namun proyek ekowisata berbasis masyarakat perlu memenuhi persyaratan operator.

**6. Mengadopsi dan Pendekatan Terpadu**

Karena pariwisata adalah bisnis yang sebenarnya mudah menguap, tidak harus dianggap sebagai obat mujarab untuk ketidakmatangan ekonomi masyarakat pedesaan. Meskipun demikian, pariwisata sebagai katalis pembangunan telah terbukti efektif terutama jika itu baik terintegrasi ke dalam strategi pembangunan secara keseluruhan dan pendekatan.

a. Integrasi dengan Konservasi, Pembangunan Berkelanjutan, dan Proyek Pariwisata yang Bertanggung jawab.

Untuk proyek ekowisata berbasis masyarakat yang diprakarsai oleh LSM, akan sering berada dalam bentuk proyek-proyek konservasi yang akan menyediakan lapangan kerja serta berkonstribusi pada keseluruhan kesejahteraan masyarakat. Bahkan banyak LSM yang memulai tahap awal dari proyek ekowisata berbasis masyarakat pada dasarnya yaitu proyek konservasi atau pembangunan berkelanjutan di mana pariwisata digunakan untuk mengkompensasi hilangnya potensi pendapatan dengan tidak menebang atau menjual kayu, dan berbagai hal lainnya.

b. Integrasi dengan Sektor Ekonomi Lainnya.

Dimensi lain dari ekowisata berbasis masyarakat yang jarang disorot adalah perannya sebagai tempat latihan bagi masyarakat setempat untuk belajar dan menguasai keterampilan bisnis seperti pengelolaan operasi, manajemen keuangan, dan pemasaran serta promosi. Keterampilan yang diusahakan oleh masyarakat setempat akan menjadi persiapan untuk melaksanakan proyek-proyek non-pariwisata yang juga membutuhkan organisasi yang baik, pemahaman yang baik, bisnis dan interpersonal keterampilan.

**7. Rencana dan Kualitas Desain Produk**

Setelah merumuskan kerangka umum untuk pengembangan pariwisata dengan sektor ekonomi lainnya, langkah berikutnya adalah merencanakan produk pariwisata potensial secara komprehensif. Hal ini mungkin memerlukan perumusan rencana aksi ekowisata berbasis masyarakat, dimana masyarakat memutuskan pada berbagai tindakan yang diperlukan untuk menciptakan pengalaman pariwisata pada suatu wilayah. Rencana aksi yang pertama memerlukan persediaan rinci dari sumber daya pariwisata di wilayah dan disepanjang koridor yang mengarah ke atraksi wisata utama di daerah sekitarnya. Dalam memudahkan penilaian maka akan menggunakan matriks penilaian. Adapun beberapa aspek lainnya yang perlu dilakukan yaitu;

a. Pengembangan Produk

Pengembangan produk harus berfokus pada pengembangan dan menampilkan produk inti untuk membedakan wilayah atau masyarakat dari tujuan wisata lainnya. Sebuah fitur ikonik seperti taman nasional atau situs warisan dunia di sekitar bisa dipandu dengan melakukan perjalanan dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dan di dalam taman situs warisan maupun alam yang kemudian dapat dikembangkan sebagai produk pariwisata inti.

b. Manajemen Destinasi/rekreasi

Manajemen destinasi atau rekreasi harus mencakup penyediaan infrastruktur dan fasilitas wisatawan yang memadai, interpretasi yang baik dan kualitas layanan yang tinggi dengan tujuan memfasilitasi perjalanan dengan aman dan menyenangkan. Tujuan manajemen yang baik akan memastikan bahwak kondisi berikut ini dibuat untuk kesenangan dan kenyamanan wisatawan.

- Mempermudah pembuatan pertanyaan , mengatur untuk layanan panduan, dan pemesana biro wisata.
- Wisata lancar dengan keterlambatan minimal di terminal angkutan umum, kunjungan sebelum memesan dan tur, layanan kamar, dan lain-lain.
- Tingkat kenyamanan yang tinggi dan keamanan di terminal angkutan umum, kendaraan transportasi, akomodasi dan fasilitas wisata lainnya.
- Kualitas pelayanan tinggi yang ditawarkan di meja, rumah tangga, layanan kamar dan pemandu wisata.
- Hangat akan keramahan dan sikap.

Sementara dalam memanajemen destinasi wisata perlu untuk membuat suatu produk wisata yang mengandung aspek-aspek berikut ini:

- Keaslian
- Mendidik
- Menghibur
- Kenikmatan
- Kenangan

c. Interpretasi dan Komunikasi

Interpretasi dan komunikasi bisa dalam bentuk interpretasi visual dan presentasi lisan. Visual presentasi dapat dikomunikasikan melalui pengaturan dari pusat penafsiran dan jalan interpretatif. Sementara interpretasi lisan akan membutuhkan pelatihan pemuda setempat untuk disertifikasi sebagai pandua. Untuk memenuhi perubahan permintaan wisata, interpretasi harus membuah hubungan interaktif antara pendamping dan tamu.

d. Kualitas Pelayanan

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, frontliner harus dikirim untuk pelatihan dalam meningkatkan keterampilan dan komunikasi mereka secara operasional. Peningkatan kapasitas dan program pelatihan tidak boleh dilakukan secara tidak urut tetapi harus direncanakan dengan baik sesuai dengan fase tertentu.

**8. Mengidentifikasi Permintaan Pasar dan Strategi Pengembangan Pemasaran**

Pada proyek ekowisata berbasis masyarakat, terutama yang diprakarsai oleh instansi pemerintah, terlalu banyak penekanan yang diberikan khususnya dalam hal promosi dengan mengorbankan pemasaran yang efektif. Dengan demikian, brosur dan pamflet secara teratur dicetak dan lebih sering didistribusikan ke target pasar yang salah.

Adapun strategi pemasaran untuk program ekowisata berbasis masyarakat harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip berikut ini:

a. Persamaan Produk dengan Segmen Pasar yang Potensial.
b. Memahami Saluran Distribusi
c. Menggunakan Sistem ICT sebagai Alat Promosi
d. Menggunakan Sistem "*piggy-back-riding*" pada Operator Tur.
e. Menyiapkan Sebuah Agen Perjalanan di rumah
f. Memanfaatkan Sertifikat Penghargaan untuk Membentuk Branding.

**9. Melaksanakan dan Memantau Kinerja**

Pada proses ini terdapat dua hal yang perlu dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan dan pemantauan kinerja proyek ekowisata berbasis masyarakat yaitu;

a. Pembangunan Fasilitas Wisata

Pelaksanaan proyek adalah kegiatan lain yang dapat memberdayakan masyarakat setempat. Setelah mengamankan dana untuk pembangunan fasilitas wisata, pendekatan konvensional dalam menunjuk kontraktor bangunan diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan yang sebenarnya. Hal ini untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara profesional untuk memenuhi standar industri dan keamanan, serta hal-hal lainnya. Namun masyarakat setempat juga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan ini.

b. Pemantauan Berkala Kinerja

Untuk menjamin keberlanjutan proyek ekowisata berbasis masyarakat, pemantauan harus diintegrasikan ke dalam seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan. Semua terlalu sering, pemantauan jarang dilakukan sehingga sulit

bagi organisasi untuk mengambil tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas produk.

Tahap-tahap dalam konsep pengembangan ini merupakan hasil perumusan sesuai dengan keberhasilan penerapan model ekowisata berbasis masyarakat yang diimplementasikan pada wilayah Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), yang terdiri dari;

- Guisi Community Heritage Based Tourism, Guimaras, The Philipines Seongup Folk Village
- Jeju Island, Korea
- Ta Phin Village, Sapa, Vietnam
- Lashihai Homestay, Lijiang, China
- Misowalai Homestay, Kinabatangan, Sabah, Malaysia
- Saung Angklung Udjo, Bandung, Indonesia
- St. Jacobs County, Toronto, Canada
- Shui-Li Snake Kilm Ceramic Park, Nantou, Chinese Taipei
- Whale Watch , Kaikoura, New Zealand
- Kuku Yalanji Dreamtime Walk, Mossman,Australia.

## 2.4 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat lokal dalam semua usaha ekowisata bukan sebuah konsep yang baru. Makna dari kata partisipasi menyiratkan mengenai bentuk keterlibatan masyarakat dalam mengambil bagian dalam kegiatan, proyek, program, pengambilan keputusan, hasil, maupun isu-isu lain yang berkaitan dengan proses pengembangan pariwisata. Alasan yang paling penting dalam mengikutsertakan penduduk lokal dalam ekowisata adalah ekuitas, dengan mempertimbangkan konservasi daerah melalui pengembangan ekowisata yang pasti memerlukan pembatasan dalam penggunaan sumber daya masyarakat lokal.

Beberapa penelitian bahkan menunjukkan akan pentingnya menggabungkan persepsi, nilai-nilai dan kepentingan rakyat lokal di daerah yang memiliki sumber daya ekowisata. Keterlibatan masyarakat lokal harus didorong dri awal dengan mempromosikan pada publik dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pembagian keuntungan.

Pada dasarnya, konsep yang menjadi dasar utama untuk pengembangan ekowisata berbasis masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat setempat. Hal ini hanya mungkin bila perencanaan ekowisata mempertimbangkan pandangan, persepsi, dan preferensi dari penduduk lokal (Isaac dan Wuleka, 2012).

Berdasarkan analisis Yulia (2014), yang membahas mengenai analisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan wisata. Berdasarkan proses yang ada pengembangan wisata dimulai oleh beberapa tahapan mulai dari perencanaan, pengelolaan atau pemanfaatan, maupun evaluasi. Semua tahapan itu tidak lepas dari kontribusi maupun peranan masyarakat sekitar kawasan wisata. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan pengembangan industri wisata serta taraf hidup masyarakat lokal setempat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Leo (2010), tentang bentuk partisipasi masyarakat terhadap atraksi wisata pendakian Gunung Slamet kawasan wisata Guci yaitu dengan usaha menjaga kelestrian Gunung Slamet dan menjaga kondisi kelangsungan atraksi wisata pendakian. Selain itu, untuk mensejahterakan masyarakat di Desa Rembul dan Guci, masyarakat melakukan pagelaran seni, membuka persewaan kuda, dan berjualan souvenir yang berhubungan dengan wisata pendakian Gunung Slamet.

## 2.5 Kearifan Lokal

Menurut Karo dalam Theresia, dkk (2015), kearifan lokal atau *Local Wisdom* merupakan gagasan-gagasan atau nilai-nilai ,pandangan-pandangan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal berfungsi untuk menjaga kelestarian dan kesinambungan "aset" yang dimiliki suatu masyarakat sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dari generasi ke generasi berikutnya tanpa harus merusak atau menghabiskan aset tersebut. Oleh sebab itu, kearifan lokal selalu dijadikan pedoman atau acuan oleh masyarakat dalam bertindak atau berperilaku dalam praksis kehidupannya.

Kearifan lokal adalah dasar untuk pengambilan kebijakan pada level lokal di bidang kesehatan, pertanian, pendidikan, pengelolaan sumber daya alam, dan kegiatan masyarakat pedesaan. Dalam kearifan lokal terkandung pula kearifan

budaya lokal yang berarti pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi maupun mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama. (Theresia, dkk, 2015)

Berdasarkan bentuknya, kearifan lokal terdiri atas enam dimensi yaitu:

1. Pengetahuan Lokal

   Setiap masyarakat dimanapun berada baik di pedesaan maupun pedalaman selalu memiliki pengetahuan lokal yang terkait dengan lingkungan hidupnya. Pengetahuan lokal terkait dengan perubahan dan siklus iklim kemarau dan penghujan, jenis-jenis fauna dan flora, dan kondisi geografi, demografi, maupun sosiografi. Hal ini terjadi karena masyarakat mendiami suatu daerah itu cukup lama dan telah mengalami perubahan sosial yang bervariasi yang menyebabkan mereka mampu beradaptasi dengan lingkungannya.

2. Nilai Lokal

   Untuk mengatur kehidupan bersama antara warga masyarakat, maka setiap masyarakat memiliki aturan atau nilai-nilai lokal yang ditaati dan disepakati bersama oleh seluruh anggotanya. Nilai-nilai ini biasanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhannya.

3. Keterampilan Lokal

   Kemampuan bertahan hidup dari setiap masyarakat dapat dipenuhi apabila masyarakat itu memiliki keterampilan lokal. Keterampilan lokal dari yang paling sederhana seperti berburu, meramu, bercocok tanam sampai membuat industri rumah tangga.

4. Sumber daya Lokal

   Sumber daya lokal ini pada umumnya adalah sumber daya alam yaitu sumber daya yang tidak terbarui maupun yang dapat diperbarui. Masyarakat akan menggunakan sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhannya dan tidak akan mengeksploitasi secara besar-besaran atau dikomersilkan.

5. Mekanisme Pengambilan Keputusan Lokal

> Menurut ahli adat dan budaya sebenarnya setiap masyarakat itu memiliki pemerintahan lokal sendiri atau disebut pemerintahan kesukuan. Suku merupakan kesatuan hukum yang memerintah warganya untuk bertindak sebagai warga masyarakat. Masing-masing masyarakat mempunyai mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Ada masyarakat yang melakukan secara demokratis dan ada juga masyarakat yang melakukan secara bertingkat atau berjenjang naik dan bertangga turun.

Pendapat lain mengemukakan bahwa bentuk kearifan lokal dapat dikategorikan ke dalam dua aspek, yaitu kearifan lokal yang berwujud nyata dan yang tidak berwujud nyata.

1. Berwujud Nyata

- Tekstual

  Beberapa jenis kearifan lokal seperti sistem nilai, tata cara, ketentuan khusus yang dituangkan ke dalam bentuk catatan tertulis seperti yang ditemui dalam kitab tradisional, primbon, kalender, dan prasi.
- Bangunan/Arsitektural

  Banyak bangunan-bangunan tradisional yang merupakan cerminan dari bentuk kearifan lokal, seperti bangunan rumah tradisional Bengkulu. Bangunan rumah rakyat ini merupakan bangunan rumah tinggal yang dibangun dan digunakan oleh sebagian besar masyarakat dengan mengacu pada ketua rumah adat.
- Benda Cagar Budaya/Tradisional (Karya Seni)

  Banyak benda-benda cagar budaya yang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal, contohnya keris. Keris merupakan salah satu bentuk warisan budaya yang sangat penting. Ilustrasi lainnya adalah batik sebagai salah satu kerajinan yang memiliki nilai seni yang tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak lama.

2. Tidak Berwujud

Selain bentuk kearifan lokal yang berwujud ada juga bentuk kearifan lokal yang tidak berwujud seperti petuah yang disampaikan secara verbal dan turun-temurun yang dapat berupa nyanyian dan kidung yang mengandung nilai-nilai ajaran tradisional. Melalui petuah atau bentuk kearifan lokal yang tidak berwujud lainnya, nilai sosial disampaikan secara oral/verbal dari generasi ke generasi.

Terkait dengan pemberdayaan masyarakat, terdapat lima isu strategis yang terkait dengan kearifan lokal, yaitu:

a. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia
b. Komitmen global terhadap pembangunan sosial masyarakat adat
c. Pelestarian lingkungan yang menghindari keterdesakan masyarakat asli dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan
d. Meniadakan marginalisasi masyarakat asli dalam pembangunan nasional
e. Memperkuat nilai-nilai kearifan masyarakat setempat dengan mengintegrasikan dalam desain kebijakan dan program pembangunan.

Menurut Saraswati (2006), dalam penelitiannya yang membahas mengenai peranan pertimbangan kearifan lokal budaya dalam perencanaan wilayah adalah salah satu cara untuk melibatkan sumberdaya lokal baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia dalam perencanaan pembangunan, karena di dalamnya ada landasan pengetahuan lokal yang diperkirakan telah berkembang sebagai potensi perencanaan bagi masyarakat setempat.

Sementara Suparmini, dkk (2013), yang melakukan penelitian pada masyarakat Baduy mengenai pelestarian lingkungan masyarakat Baduy berbasis kearifan lokal, menyimpulkan bahwa secara umum, masyarakat Baduy masih sangat bergantung pada alam dan senantiasa menjaga keseimbangan alam. Kearifan lokal masyarakat Baduy dalam mengelola sumberdaya alam khususnya dalam hal pelestarian lingkungan masih disesuaikan dengan adat istiadat. Bentuk perilaku pelestarian lingkungan dan konservasi lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat Baduy, antara lain meliputi: sistem pertanian, pengetahuan, teknologi, dan praktik konservasi.

## 2.6 Pariwisata yang Berkelanjutan

WTO mendefinisikan pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan wisatawan saat ini, sambil melindungi dan mendorong kesempatan untuk waktu yang akan datang. Mengarah pada pengelolaan seluruh sumber daya sedemikian rupa sehingga kebutuhan ekonomi, sosial, dan estetika terpenuhi sambil memelihara integritas kultural, proses ekologi, esensial, keanekaragaman hayati dan sistem pendukung kehidupan. Produk pariwisata berkelanjutan dioperasikan secara harmonis dengan lingkungan lokal masyarakat dan budaya sehingga mereka menjadi penerima keuntungan yang permanen.

Menurut Yaman dan Mohd (2004), pembangunan pariwisata yang berkelanjutan ditandai dengan empat kondisi yaitu: 1) anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pembangunan pariwisata; 2) pendidikan bagi tuan rumah, pelaku industri dan pengunjung; 3) kualitas habitat kehidupan liar, penggunaan energi dan iklim mikro harus dimengerti dan didukung; 4) investasi pada bentuk-bentuk transportasi alternatif.

Sedangkan indikator yang harus dikembangkan Republik Indonesia tentang pariwisata yang berkelanjutan adalah: 1) kesadaran tentang tanggungjawab terhadap lingkungan, bahwa strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan harus menempatkan pariwisata sebagai green industry (industri yang ramah lingkungan) yang menjadi tanggungjawab pemerintah, industri pariwisata, masyarakat, dan wisatawan; 2) peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata; 3) kemantapan/pemberdayaan industri pariwisata yaitu mampu menciptakan produk pariwisata yang bisa bersaing secara internasional dan mensejahterakan masyarakat di tempat tujuan wisata; 4) kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata yang bertujuan menghapus atau meminimalisir perbedaan tingkat kesejahteraan wisatawan dan masyarakat di daerah tujuan wisata untuk menghindari konflik dan dominasi satu sama lain. Hal ini juga didukung dengan memberi perhatian atau pengembangan usaha skala kecil oleh masyarakat lokal.

Pada dasarnya terdapat tiga prinsip yang harus diperhatikan dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan yaitu;

1. *Ecologycal Sustainability*

   Sebuah pembangunan pariwisata berkelanjutan harus didukung keberlanjutan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam sebagai pendukung. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mampu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan fisik akibat aktivitas wisatawan. Sebuah pembangunan pariwisata berkelanjutan harus didukung keberlanjutan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam sebagai pendukung. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mampu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan fisik akibat aktivitas wisatawan melalui penentuan kapasitas yang terbatas pada daya tarik wisata tersebut.

2. *Economic Sustainability*

   Keberlanjutan dalam bidang ekonomi yang mampu menguntungkan masyarakat lokal, wisatawan dan pelaku bisnis pariwisata dalam daya tarik wisata tersebut.

3. *Social and Cultural Sustainability*

   Keberlanjutan dalam bidang sosial dimana diharapkan masyarakat lokal berpartisipasi dalam pembangunan yang berkelanjutan tersebut. Baik itu dalam merencanakan, menjalankan, dan mengawasi jalannya sebuah pembangunan tersebut, sehingga masyarakat mampu memilah hal-hal baik maupun buruk yang masuk dalam tatanan sosial masyarakatnya. Keberlanjutan budaya akibat interaksi dengan wisatawan yang memiliki gaya hidup, kebiasaan dan tradisi yang berbeda dengan masyarakat lokal. Diperlakukan tindakan pencegahan terhadap distorsi budaya yang dimiliki masyarakat lokal sehingga budaya lokal tetap berkelanjutan

Menurut Yazdi (2012), dalam penelitiannya mengenai pariwisata yang berkelanjutan mengemukakan bahwa pariwisata yang berkelanjutan merupakan salah satu usaha untuk meminimalkan dampak pada lingkungan dan budaya lokal. Sementara itu juga membantu menghasilkan kerja di masa depan bagi masyarakat lokal. Tujuan dari pariwisata berkelanjutan adalah untuk memastikan bahwa pembangunan dapat memberikan pengalaman positif bagi masyarakat lokal, instansi pariwisata maupun para wisatawan sendiri.

Penelitian sejenis oleh Waimbo (2012), membahas tentang keterlibatan masyarakat dan peran pemimpin lokal di Kampung Sawinggrai Kabupaten Raja Ampat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Pada penelitian tersebut dikemukakan bahwa dalam rangka menuju pengembangan wisata yang berkelanjutan salah satu sisi yang perlu untuk dilihat yaitu mengenai pengetahuan dan pengalaman masyarakat lokal dalam menjaga kondisi lingkungan kampungnya sendiri. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa komunitas masyarakat lokal di Kampung Sawinggrai yang bergerak aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sehingga saat ini, perkembangan di Kampung Sawinggrai bisa mengalami perkembangan dengan baik.

## 2.7 Potensi dan Permasalahan Pariwisata di Tana Toraja

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan judul Identifikasi Potensi dan Masalah dalam Pengembangan Daerah Tana Toraja (Toraja Bagian Selatan) sebagai Kawasan Pariwisata didapatkan hasil bahwa potensi pariwisata yang ada di Tana Toraja sangatlah beragam. Hal ini didukung dengan panorama bentang alam yang sangat indah, atraksi budaya yang unik, dan suasana daerah yang sangat tenang dan damai sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata religi. Namun, berbagai macam permasalahan masih menjadi hambatan bagi Tana Toraja untuk menjadi salah satu tujuan utama destinasi pariwisata. Ketersediaan fasilitas, seperti penginapan di titik kawasan wisata masih sangat minim begitupun dalam hal pengelolaan kawasan wisatanya. Minimnya *guide* juga menjadi salah satu permasalahan. Selain itu, aksesibilitas jalan yang belum mendukung, baik dari segi kualitas jalan maupun ketersediaan transportasi umum yang masih sangat minim. Hal inilah yang menjadi permasalahan bahwa Tana Toraja masih belum bisa mengeksplor potensi pariwisatanya dengan sangat baik khususnya dalam hal pemberdayaan masyarakat lokal (Thoban,dkk, 2015).

Adapun dari hasil yang didukung dengan beberapa referensi dari literature yang ada maka akan dirumuskan konsep penerapan ekowisata berbasis masyarakat karakteristik wilayah Tana Toraja khususnya dalam mendukung promosi kearifan lokal yang ada menuju pariwisata Tana Toraja yang berkelanjutan.

**Tabel 2.3**

**Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat dengan Mempromosikan Kearifan Lokal**

| Kriteria | Indikator | Literature |
|---|---|---|
| Peran Masyarakat Lokal | 1. Komunitas yang menjadi pengelola kegiatan di daerah ekowisata dengan dukungan dari pemerintah maupun organisasi masyarakat. | *Yoeti (1996), Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata (2009)* |
| | 2. Sebagai pengusaha dalam hal;<br>• Jasa akomodasi (ketersediaan homestay)<br>• Transportasi<br>• Pemandu<br>• Promosi hasil kerajinan atau cenderamata yan bernuansa lokal | *Damanik dan Weber (2006), Yoeti (1996), dan Departemen Pariwisata dan Kebudayaan dan WWF (2009)* |
| | 3. Bertanggung jawab dalam mengelola, merintis, dan memelihara objek wisata termasuk dalam hal penentuan biaya. | *Departemen Pariwisata dan Kebudayaan dan WWF (2009),Damanik dan Weber (2006), Wood (2002), Yoeti (1996)* |
| Kearifan Lokal | 1. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan dengan melestarikan tradisi, seni lokal maupun budaya yang ada melalui paket-paket wisata. | *Departemen Pariwisata dan Kebudayaan dan WWF (2009) dan Theresia dkk (2015)* |
| | 2. Edukasi pada budaya maupunkegiatan sehari-hari masyarakat lokal termasuk panen, menanam untuk memperkenalkan wisatawan cara hidup masyarakat dan mengajak mereka menghargai pengetahuan dan kearifan lokal | *Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata (2009)* |

*Sumber:Hasil Studi Pustaka,2016*

**Tabel 2.4**

**Hasil Penelitian Terdahulu Mengenai Ekowisata Berbasis Masyarakat**

| No | Penulis | Judul | Sumber | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Auesriwong A, Nilnoppakun A, dan Parawech N. | Integrative Participatory Community Based Ecotourism At Sangkhom District, Nang Khai Province, Thailand | Procedia Economic and Finance Vol.23 (2015) 778-782 | • Integratif pengembangan ekowisata berbasis masyarakat Kabupaten Sangkhom berhasil meningkatkan partisipasi stakeholder dalam proses perencanaan pariwisata<br>• Ekowisata berbasis masyarakat dapat dikategorikan sebagai pariwisata yang berkelanjutan karena tidak hanya memberdayakan warga setepat untuk membuat keputusan juga memperkuat sosial dan modal pada generasi berikutnya untuk mengembangkan pariwisata. |
| 2. | Doddy Soedigdo dan Yesser Priono | Peran Ekowisata dalam Konsep Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Pada Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling, Kalimantan Tengah | Jurnal Perspektif Arsitektur Volume 8. No.2 Tahun 2013 | Pengembangan ekowisata sangat berpengaruh dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat seperti halnya penelitian yang dilakukan di Desa Bukit Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kalimantan Tengah. Beberapa faktor yang berpengaruh dalam mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat di Kota Batu meliputi: perlindungan terhadap alam, skill/keahlian masyarakat, dukungan pemodalan, akses terhadap pengembangan |

| No | Penulis | Judul | Sumber | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| | | | | sumber daya, fasilitas dan infrastruktur, kepedulian wisatawan terhadap alam, dan pengetahuan ekowisata. |
| 3. | Dohar dan Isti | Social Entrepreneurship to Develop Ecotourism | Procedia Economics and Finance Volume 4. (2012) 398-405 | Pendekatan yang paling tepat dari pengembangan ekowisata berbasis masyarakat adalah kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial dapat menyebabkan perubahan sosial yang lebih baik dari kesejahteraan dan pendidikan. Hal ini akan mendidik orang tentang alam, mereka sebagai mahkluk sosial yang memiliki tanggunjawab untuk meningkatan taraf hidup masyarakat dan menjaga lingkungan mereka. |
| 4. | Eka Desi Yulia | Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata | Departemen Sains dan Pengembangan Masyarakat. Tahun 2014 | Pada dasarnya pengembangan wisata dimulai oleh beberapa tahapan mulai dari perencanaan, pengelolaan atau pemanfaatan maupun evaluasi dan semua tahapan itu tidak lepas dari konstribusi maupun peranan masyarakat sekitar kawasan wisata. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan pengembangan industri wisata serta taraf hidup masyarakat lokal setempat. |

| No | Penulis | Judul | Sumber | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Erlis Waimbo dan Danny | Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Keterlibatan Masyarakat dan Peran Pemimpin Lokal di Kampung Sawinggrai, Kabupaten Raja Ampat | Universitas Kristen Satya Wacana : Magister Studi Pembangunan. Tahun 2012 | Menuju pengembangan wisata yang berkelanjutan merupakan salah satu sisi yang perlu untuk dilihat yaitu mengenai pengetahuan dan pengalaman masyarakat lokal dalam menjaga kondisi lingkungan kampungnya sendiri. Hasilnya bahwa komunitas masyarakat lokal di Kampung Sawinggrai yang bergerak aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan mereka sehingga bisa mengalami perkembangan yang baik. |
| 6. | Etsuko Okasaki | A Community Based Touris Model : It's Conception and Use | An International Multidisciplinary Journal Of Tourism. Volume 6(5) tahun 2008 511-528. | • Tingkat partisipasi masyarakat dalam organisasi masih sebagai pihak informan, masih banyak penduduk Corond Island dan Coron Town yang tidak berpartisipasi dalam pariwisata<br>• Modal sosial harus dibangun antara masyarakat dengan pihak pemangku kepentingan dan menciptakan hubungan dengan pemerintah. |
| 7. | Jeffrey O. Jalani | Local People Perception on The Impacts and Importance of Ecotourism in Sabang, Palawan Filipina | Procedia Social and Behavioral Science. Volume 57 (2012) 247-254. | Dalam mempertahankan keberlanjutan dari wisata ekowisata di Sabang, maka diperlukan manajemen pengelolaan secara terus menerus. Selain itu, perlu untuk menambahkan fasilitas dan potensi pariwisata sehingga |

| No | Penulis | Judul | Sumber | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| | | | | semakin meningkatkan wisatawan. Pentingnya pendidikan dan kesadaran terhadapp program lingkungan harus mengikutsertakan pengunjung dan penduduk lokal. |
| 8. | Leo Mukhammad | Partisipasi Masyarakat Terhadap Atraksi Wisata Pendakian Gunung Slamet Kawasan Wisata Guci | Jurnal Tataloka, Vol.12(3): 192-202 | Bentuk partisipasi masyarakat terhadap atraksi wisata pendakian Gunung Slamet kawasan wisata Guci yaitu dengan usaha menjaga kelestarian Gunung Slamet dan menjaga kondisi keberlangsungan atraksi wisata pendakian. Selain itu, untuk mensejahterakan masyarakat di Desa Rembul dan Guci, masyarakat melakukan pagelaran seni, membuka persewaan kuda, dan berjualan souvenir yang berhubungan dengan wisata. |
| 9. | Luh Gede Leli Kusuma Dewi | Usaha Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Beraban dan Pengelolaan Tanah Lot Secara Berkelanjutan | Jurnal Pariwisata Volume 13 No.1 Tahun 2013 (32-44) | Bentuk pemberdayaan ekonomi sosial masyarakat Desa Pakraman Beraban yang terlibat dalam pariwisata yaitu;<br>• Pemberdayaan ekonomi dimana masyarakat dapat memberikan keuntungan materiil berupa pendapatan tambahan yang dapat membantu perekonomian keluarga.<br>• Pemberdayaan sosial, dengan terlibatnya masyarakat dalam mengelola Tanah Lot dapat mendatangkan |

| No | Penulis | Judul | Sumber | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| | | | | keuntungan dan kesuksesan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dalam bidang pariwisata. |
| 10. | Manu, Isaac dan Kunder, Corad-J, Wuleka | Community Based Ecotourism and Livelihood Enhancement in Sirigu, Ghana | International Journal of Humanities and Social Science. Volumen 2. No.18. Tahun 2012. pp 97-108. | Studi ini secara umum menjelaskan bahwa ekowisata berbasis masyarakat dapat digunakan sebagai alat strategis untuk pengentasan kemiskinan seperti dalam kasus Sirigu. Peningkatan mata pencaharian melalui kegiatan yang akan menghasilkan pendapatan terkait tujuan ini telah menjadi suatu hal yang mungkin karena manajemen dan pembangunan kapasitas pada proyek ekowisata berbasis masyarakat di Sirigu telah selesai dengan bantuan masyarakat lokal yang memang benar-benar reflek dari ekowisata berbasis masyarakat. |
| 11. | Mochammad Widjanarko, Dian Wismar'ein | Identifikasi Sosial Potensi Ekowisata Berbasi Peran Masyarakat Lokal | Jurnal Psikologi Undip, Vol. 9 No.1 April 2011 | Ekowisata berbasis masyarakat merupakan salah satu konsep yang perlu diberdayakan kepada masyarakat yang mana masyarakat harus berperan aktif dalam kegiatan pengembangan ekowisata dari mulai perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Dan hasil ekowisata pun sebanyak mungkin harus dinikmati oleh masyarakat setempat. |

| No | Penulis | Judul | Sumber | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 12. | Nick Kontogeorgopolous | Community Based Ecotourism in Phuket and Ao Phangnga, Thailand: Partial Victories and Bittersweet Remedies | Journal Of Sustainable Tourism, Vol 13, No.1, 2015 | Penawaran ekowisata berbasis masyarakat menjadi suatu harapan bahwa sensitivitas lingkungan dan tanggung jawab dipromosikan oleh ekowisata juga dapat melayani kepentingan politik, ekonomi, dan sosial ekowisata berbasis masyarakat. |
| 13. | Regina Scheyvens | Ecotourism and the empowerment of local communities | Tourism Management 20 (1999) 245-249 | Berdasarkan perspektif pembangunan, usaha ekowisata hanya harus dipertimbangkan sukses apabila masyarakat memiliki ukuran kontrol atas mereka dan jika mereka membagikan secara adil atas keuntungan yang muncul dari kegiatan ekowisata. Adanya kerangka pemberdayaan merupakan suatu mekanisme yang cocok untuk analisis dampak sosial, ekonomi, psikologis, dan politik di masyarakat lokal. |
| 14. | Slinger Vannesa, Friedman | Ecotourism in Dominica : Studying The Potential for Economic Development, | Island Studies Journal, Vol.4, No.1,2009, pp 3-24 | Ekowisata merupakan salah satu konsep pengembangan yang tepat untuk mempromosikan pembangunan daerah yang beragam, selain itu dapat meningkatkan hubungan |

| No | Penulis | Judul | Sumber | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| | | Environmental Protection, Cultural Conservation | | dengan sektor ekonomi lainnya dan mendorong praktek yang lebih berkelanjutan mengenai lingkungan serta memberikan dampak positiv bagi budaya setempat |
| 15. | Tomas Lopez, dkk | Community Based Tourism in Developing Countries : A Case Study | An International Multidisciplinary Journal Of Tourism. Volume 6.No.1 Tahun 2011. pp 69-84 | Beberapa yang menjadi potensi pembangunan masyarakat lokal adalah: 1) Akomodasi; 2) Makanan; 3) Kerajinan Tangan; 4) Kegiatan Olahraga. Namun permasalahan yang dihadapi bahwa dalam menjalan potensi tersebut masih diambil ahli oleh pihak pemerintah dan perusahaan swasta. Masyarakat berpendapat bahwa dengan menciptakan suatu rute tur akan menciptakan suatu lapangan pekerjaan. |

*Sumber: Hasil Studi Pustaka, 2016*